

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
EFESIENSI, DAN KESERASIAN DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) PADA
PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI RIAU TAHUN
2019-2023)**

*(Financial performance analysis of Riau province's local
revenue agencies (2019-2023))*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive
Sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

Oleh

WILDATUL HIKMAH

2161201242

MANAJEMEN



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2025

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WILDATUL HIKMAH

NIM : 2161201242

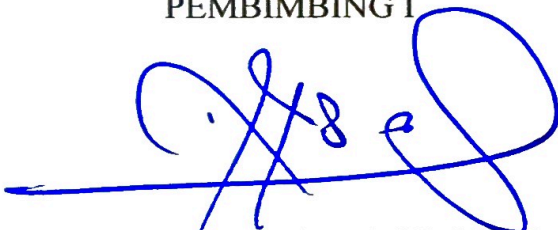
FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : MANAJEMEN

JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), EFESIENSI, DAN KESERASIAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2023)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I



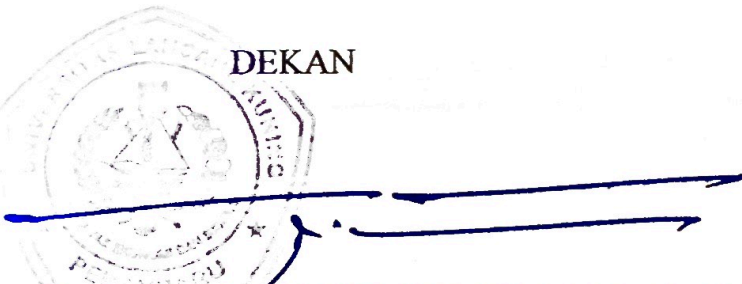
Dr. IDEL WALDELMY, SE., I.M.Si
NIDN : 1008078602

PEMBIMBING II



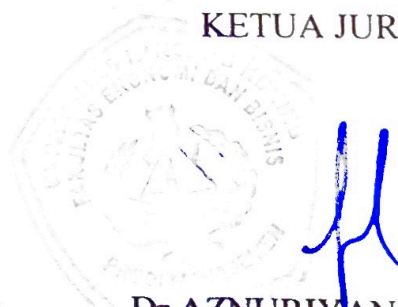
Drs. SAFRUL RAJAB, M.M
NIDN : 0009095906

DEKAN



Dr. DINI ONASIS, S.E., S.H., M.M., MH., Ak., CA., ACPA
NIDN 1006067101

KETUA JURUSAN



Dr. AZNURIYANDI, SE., M.Si
NIDN : 1021088602

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WILDATUL HIKMAH

NIM : 2161201242

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : MANAJEMEN

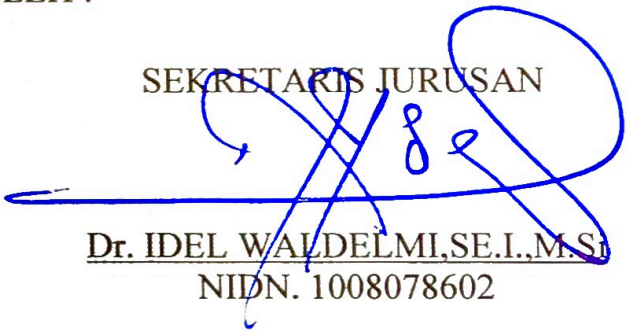
JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), EFESIENSI, DAN KESERASIAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2023)

DISETUJUI OLEH :

KETUA JURUSAN

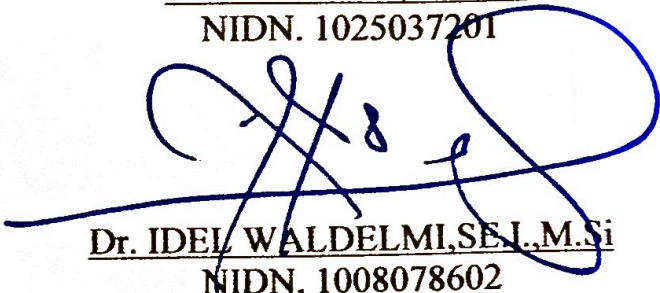

Dr. AZNURIYANDI, SE., M.Si
NIDN. 1021088602

SEKRETARIS JURUSAN

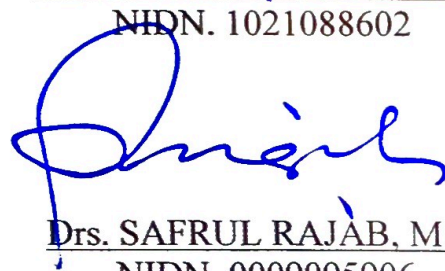

Dr. IDEL WALDELM, SE.I., M.Si
NIDN. 1008078602

ANGGOTA


RITA WIYATI, SE.MM.
NIDN. 1025037201


Dr. IDEL WALDELM, SE.I., M.Si
NIDN. 1008078602


Dr. AZNURIYANDI, SE., M.Si
NIDN. 1021088602


Drs. SAFRUL RAJAB, M.M
NIDN. 0009095906

ABSTRAK

This research aims to analyze the financial performance of the Provincial Government of Riau from 2019 to 2023, focusing on the effectiveness of Local Revenue (PAD), financial efficiency, and budgetary harmony. Utilizing a quantitative approach and secondary data from the Realization Reports of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), as well as data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance, the analysis is conducted through financial ratios. The results indicate that the Effectiveness Ratio of PAD reached 108.88% in 2023, while the Efficiency Ratio was 105.06%. However, the Harmony Ratio for capital expenditure remained low at 20.53% in the same year. These findings emphasize the importance of transparent and accountable financial management to support sustainable development in Riau Province.

Keywords: *Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio and Harmony Ratio.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fokus pada efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi keuangan, dan keserasian anggaran. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (APBD), serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, analisis dilakukan melalui rasio keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD mencapai 108,88% pada tahun 2023, sementara Rasio Efisiensi mencapai 105,06%. Namun, Rasio Keserasian untuk belanja modal masih rendah, yaitu 20,53% pada tahun yang sama. Temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpah serta rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian sebagai syarat pengajuan skripsi dengan judul **“Analisis kinerja keuangan dengan Rasio Efektivitas pendapatan Asli (PAD), Efesiensi, dan keserasian pada badan pendapatan (bapenda) daerah pada pemerintah daerah (Provinsi Riau tahun 2019-2023)”**

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna sebagai bahan pembelajaran dan dapat dijadikan bahan acuan untuk penulis agar dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang tersayang yang telah membesarkan, mendidik, mendukung, menyayangi dan tiada hentinya memberikan semangat setiap hari serta doa yang tidak pernah terputus, dan yang tak pernah terlupakan jasa, kasih sayang mu, pengorbanan mu, terimakasih telah memberikan fasilitas- fasilitas terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan S1, maafkan apabila hingga detik ini penulis belum bisa membalas dan bahkan tidak akan mampu membalas semua kebaikan hingga akhir hayat, tak lupa untuk adik- adikku dan saudara saudariku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mendoakan.

2. Bapak Dr. Dini Onasis, S.E.,S.H.,M.M.,MH.,Ak.,CA.,ACPA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang kuning. yang telah Mengambil kebijakan dalam memproses permasalahan yang bersangkutan dengan Akademik, dan telah memberikan semangat kepada penulis, Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas untuk membangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi lebih unggul.
3. Bapak Dr.Aznuriyandi, SE.,M.Si dan Bapak Dr. Idel waldelmi, SE.,I,M.Si, Selaku Ketua Jurusan prodi manajemen dan Sekretaris Jurusan prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lancang kuning. Yang telah Memberikan jalan keluar dalam memproses permasalahan didalam akademik, Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas untuk membangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi lebih baik lagi.
4. Bapak Dr. Idel waldelmi, SE.,I,M.Si, Selaku Dosen Pembimbing I skripsi. Yang telah memberikan saran, Selalu memberikan motivasi, dan selalu memberikan semangat, dan mempermudah dalam penulisan skripsi , Terima kasih pak yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu dan bersedia untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Serta terima kasih telah memberikan banyak saran dan masukan dari setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan.

5. Bapak Safrul rajab, M.M. Selaku Dosen pembimbing II skripsi. Yang telah memberikan motivasi dan mempermudah dalam penulisan skripsi, . Serta terima kasih telah memberikan banyak saran dan masukan dari setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan.
6. Bapak Dr.Fatkhurahman, S.E.,M.Si.,M.M, Selaku wakil dekan III, Yang telah Memberikan jalan keluar dalam permasalahan yang bersangkutan dengan akademik yang dialami oleh mahasiswa, Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas untuk membangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi lebih baik lagi.
7. Dosen Pembimbing Akademik yang telah mempermudah mentanda tangani KRS Penulis, sehingga penulis dapat mengikuti ujian skripsi.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangatnya dan dukungannya kepada penulis.

Pekanbaru, 12 februari 2025

Wildatul hikmah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
PERNYATAAN.....	II
I. KATA PENGANTAR.....	III
II. DAFTAR ISI	VI
III. DAFTAR TABEL	VII
IV. DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian	8
1.3.1. Tujuan penelitian	8
1.3.2. Manfaat penelitian	9
1.4. Sistematika penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
1.1.Telaah pustaka	12
1.2.Kerangka pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Objek penelitian	44
3.2. Jenis data dan sumber	44
3.2.1. Jenis data.....	44
3.2.2. Sumber data	45
3.3. Teknik pengumpulan data	45
3.4. Identifikasi dan operasionalisasi variable	46
3.5. Analisis data	51

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
5.1. Hasil penelitian.....	66
5.2. Pembahasan.....	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	90
6.1. Kesimpulan	90
6.2. Saran- saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan realisasi APBD dan biaya pemerintah daerah provinsi riau 2019- 2023	3	
Tabel 2.1. kriteria penilaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah.....	37	
Table 2.2 kriteria penilaian efesiensi pengelolaan keuangan daerah	39	
Table 2.3. kriteria penilaian keserasian pengelolaan keuangan daerah.....	41	
Table 3.1 operasionalisasi variable rasio kinerja pemerintah daerah	47	
Table 5.1 laporan realisasi anggaran (LRA) 2019	67	
Table 5.2 laporan realisasi anggaran (LRA) 2020	68	
Table 5.3 laporan realisasi anggaran (LRA) 2021	69	
Table 5.4 laporan realisasi anggaran (LRA) 2022	70	
Table 5.5 laporan realisasi anggaran (LRA) 2023	71	
Tabel 5.6 Perhitugan rasio efektivitas PAD pemerintah provinsi Riau tahun 2019- 2023.....	73	76
Tabel 5.7 Perhitugan rasio efesiensi keuangan daerah pemerintah provinsi Riau tahun 2019-2023	80	
Tabel 5.8 Perhitugan rasio keserasian keuangan daerah pemerintah provinsi Riau tahun 2019-2023 (belanja operasi).....	80	
Tabel 5.9 Perhitugan rasio keserasian keuangan daerah pemerintah provinsi Riau tahun 2019-2023 (belanja modal)	83	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 paradigma penelitian.....	43
Gambar 4.1 peta wilayah provinsi Riau	55
Gambar 4.3 struktur organisasi badan pendaptan daerah	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah instrumen penting yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Informasi ini ditujukan untuk berbagai pihak, termasuk eksekutif, DPRD, dan masyarakat, dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan tersebut juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang berlaku (mahmudi 2019). Fungsi laporan keuangan yaitu untuk memberi informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi masih banyak pihak yang belum memahami ketika membaca laporan keuangan. Hal itu dikatakan wajar, mengingat berbagai pihak tersebut asalnya dari latar belakang yang berbeda-beda.

Signifikansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik dan mendukung pembangunan di wilayahnya. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai, kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penilaian ini mencakup kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi dalam pengeluaran, dan keserasian dalam alokasi anggaran untuk berbagai sektor. Konteks Provinsi Riau merupakan salah satu daerah

Dengan potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan migas. Namun, seperti banyak daerah lain, Riau menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah dan pengelolaan keuangan. Analisis kinerja keuangan di Riau relevan untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah memaksimalkan potensi PAD dan mengalokasikan anggaran secara efisien dan serasi.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk menjalankan fungsinya, seperti memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya seperti minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit, dan sektor industri lainnya. Untuk itu, evaluasi kinerja keuangan Provinsi Riau menjadi penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan keserasian pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis, yaitu Rasio Efektivitas PAD, mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan kemandirian keuangan daerah. Rasio Efisiensi menilai kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output yang optimal dengan biaya yang minimum. Dan Rasio Keserasian menilai

proporsi alokasi anggaran, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga mencerminkan keserasian dalam pengeluaran pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kinerja merupakan aktivitas yang terukur dari suatu entitas dalam periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD nya, berikut table Perkembangan realisasi APBD dan biaya daerah provinsi Riau dari tahun 2019 sampai 2023 dengan hasil 5 tahun terakhir yang akan diteliti seperti table 1.1 sebagai berikut :

Table 1.1

Perkembangan Realisasi APBD dan biaya Pemerintah Daerah provinsi Riau

Tahun anggaran 2019 - 2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan daerah			Belanja daerah		
	Rencana pendapatan	Realisasi pendapatan	%	Rencana belanja	Realisasi belanja	%
2019	9.129.05.M	8.703.23.M	95.34%	9.179.05.M	8.690.39.M	94.68%
2020	10.216,29.M	8.622.82.M	84.4%	10.282.17M	8.172.71.M	79.48%
2021	9.032,75.M	9.383.00.M	103.88%	9.132.75.M	8.931.70,M	97.8%
2022	8.656.85.M	8.818.67,M	101,87%	8.656.85.M	9.102.47.M	105,15%
2023	9.481,27.M	10.009.98.M	105.58%	10.142.48.M	10.515,61.M	103.68%

Sumber data : Realisasi APBD provinsi Riau Tahun 2019-2023

Dari data perkembangan realisasi APBD dan biaya pemerintah daerah provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan Dalam perjalanan keuangan daerah selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat dinamika yang mencerminkan tantangan dan pencapaian yang signifikan. Data yang diperoleh memberikan gambaran jelas tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2019 di mana pemerintah daerah merencanakan pendapatan sebesar Rp 9.129,05 miliar. Namun, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 8.703,23 miliar, dengan persentase pencapaian 95,34%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi. Di sisi belanja, rencana sebesar Rp 9.179,05 miliar juga tidak sepenuhnya terealisasi, dengan realisasi mencapai Rp 8.690,39 miliar atau 94,68%. Meskipun ada tantangan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun mendatang.

Memasuki tahun 2020, Rencana pendapatan ditetapkan lebih tinggi, yaitu Rp 10.216,29 miliar, tetapi realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 8.622,82 miliar, dengan persentase pencapaian yang merosot menjadi 84,4%. Belanja daerah pun mengalami penurunan, dari rencana Rp 10.282,17 miliar menjadi Rp 8.172,71 miliar, yang hanya mencapai 79,48%. Penurunan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi banyak sektor dan mengakibatkan penurunan pendapatan.

Namun, tahun 2021. Dengan rencana pendapatan yang lebih realistis sebesar Rp 9.032,75 miliar, pemerintah daerah berhasil melampaui target dengan

realisasi pendapatan mencapai Rp 9.383,00 miliar, atau 103,88%. Ini adalah momen kebangkitan yang sangat dinantikan. Meskipun belanja daerah sedikit menurun, dengan realisasi sebesar Rp 8.931,70 miliar dari rencana Rp 9.132,75 miliar (97,8%), masyarakat mulai merasakan dampak positif dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Di tahun 2022, pemerintah daerah kembali menunjukkan kinerja yang baik. Rencana pendapatan tetap di angka Rp 8.656,85 miliar, dan realisasi pendapatan mencapai Rp 8.818,67 miliar, dengan persentase pencapaian 101,87%. Belanja daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan realisasi mencapai Rp 9.102,47 miliar dari rencana yang sama, mencerminkan pencapaian 105,15%. Tahun ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengelola anggaran dengan lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan.

Dan di tahun 2023 menjadi puncak dari perjalanan ini. Dengan rencana pendapatan yang meningkat menjadi Rp 9.481,27 miliar, pemerintah daerah berhasil meraih realisasi pendapatan sebesar Rp 10.009,98 miliar, melampaui target dengan persentase pencapaian 105,58%. Belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi mencapai Rp 10.515,61 miliar dari rencana Rp 10.142,48 miliar, yang mencerminkan pencapaian 103,68%.

Secara keseluruhan, perjalanan keuangan daerah dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan dinamika yang menarik. Meskipun menghadapi tantangan di tahun 2020, pemerintah daerah berhasil bangkit dan menunjukkan kinerja yang semakin baik di tahun-tahun berikutnya.

Penelitian Juddy Julian (2017) tentang Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado pada periode 2011-2015. Jenis penelitian yang digunakan Juddy adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado pada periode 2011-2015 yang diperoleh dari transparansi internet di situs resmi Dewan Manajemen Keuangan dan Properti Daerah Kota Manado.

Juddy juga menggunakan analisis Rasio Keuangan Daerah untuk menilai kinerja keuangan Kota Manado dengan menghitung Rasio Kemandirian, Tingkat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan kesesuaian Pengeluaran. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah adalah dengan menghitung Share and Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Kemampuan Keuangan. Berdasarkan perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado,

Juddy menyimpulkan bahwa pola hubungan tingkat otonomi daerah di Kota Manado berada pada kriteria instruktif atau Pemerintah Kota Manado masi mendapatkan instruksi dari Pemerintah Pusat. Tingkat Desentralisasi Fiskal masi kurang, tetapi Rasio Efektivitas sangat efektif dan Rasio Efisiensi juga sangat efisien. Dan Kongruensi menunjukkan keseimbangan antar pengeluaran tidak seimbang. Kemudian untuk perhitungan dan analisis

Kemampuan Keuangan Daerah, berdasarkan hasil perhitungan dan analisisnya Juddy menyimpulkan juga bahwa kondisi Kemampuan Keuangan Kota Manado masi belum ideal. Hasil Perhitungan Share and Growth, posisi Kota Manado berada di kuadran II dan indeks Kemampuan Keuangan Kota Manado tinggi.

Riau dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, PAD di Riau sangat dipengaruhi oleh sektor perkebunan, kehutanan, dan hasil tambang. Sumber PAD utama Riau meliputi:

1. Pajak Daerah: Kontribusi besar dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Dividen dari BUMD seperti PT Bank Riau Kepri Syariah dan perusahaan perkebunan.
3. Retribusi Daerah: Penghasilan dari retribusi layanan publik dan fasilitas umum.
4. Lain-lain Pendapatan Sah: Termasuk pendapatan dari pengelolaan aset dan kerja sama daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah penilaiannya dengan rasio efektivitas PAD, Efesiensi dan keserasian memiliki asumsi menekankan pentingnya penggunaan rasio keuangan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari dan Widodo 2021), khususnya di Provinsi Riau. Analisis ini tidak hanya relevan untuk memahami kemampuan keuangan

daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa depan. Berdasarkan kepada uraian tersebutlah penulis menjadi tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul yaitu “Analisis Kinerja Keuangan dengan rasio efektivitas pendapatan daerah (PAD), Efisiensi, dan keserasian pada badan pendapatan daerah (bapenda) Pada pemerintah Daerah (Provinsi Riau tahun 2019-2023) “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi keuangan daerah, dan Rasio keserasian pada tahun 2019 -2023?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk rasio efektivitas, efisiensi, dan keserasian. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat lebih siap untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan di masa depan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi

mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Riau.

1.3.2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan melihat Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian, meliputi :

1. Untuk peneliti, Peneliti dapat memperdalam pemahaman teori dan konsep yang menjadi fokus penelitiannya. Menambah wawasan dan pengetahuan baru di bidang keilmuan tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dapat ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian.
2. Untuk pemerintahan daerah, diharapkan dapat menjadi referensi dalam menganalisis Kinerja Keuangan untuk meningkatkan kualitas kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perluasan wawasan pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besarnya penulis akan mendeskripsikan secara sistematis struktur dari isi laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan ini di bagi kedalam (6) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mengungkapkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan mengenai pengertian Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah dan jenis rasio keuangan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data dan analisis yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum pemerintah daerah provinsi riau dan struktur organisasi pemerintah daerah provinsi riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian dan variable-variabel yang ada.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan serta saran – saran yang mungkin bermanfaat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang tercermin melalui tiga rasio utama: efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi keuangan daerah, dan keserasian alokasi anggaran. Selama periode 2019 hingga 2023, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan tren yang positif, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi.

1. Rasio Efektivitas PAD : Kinerja efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi. Setelah mencapai 98,59% pada 2019, rasio ini turun menjadi 83,54% pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pemerintah berhasil pulih dengan mencapai 100,11% pada 2021, 98,87% pada 2022, dan puncaknya 108,88% pada 2023. Ini menunjukkan perbaikan dalam strategi pengelolaan PAD.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah: Pengelolaan belanja daerah relatif efisien, dengan rasio efisiensi di atas 90% dari

3. 2019 hingga 2023. Pada 2022 dan 2023, rasio efisiensi mencapai 103,21% dan 105,06%, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola belanja secara efektif.
4. Rasio Keserasian: Tantangan muncul dalam alokasi belanja modal, yang masih rendah. Pada 2020, rasio belanja modal hanya 8,95%, dan meskipun ada perbaikan menjadi 20,53% pada 2023, angka ini masih jauh dari ideal. Rendahnya belanja modal dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, meski efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan menunjukkan kemajuan, perhatian lebih perlu diberikan pada alokasi belanja modal. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya Provinsi Riau:

1. Pemerintah daerah provinsi Riau diharapkan dapat terus berinovasi dalam strategi pengelolaan keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
2. Peneliti diharapkan bisa melakukan penelitian di pemerintah provinsi Riau dan menambah periode waktu penelitian serta menambahkan jenis-jenis rasio keuangan yang lebih banyak sehingga penelitiannya lebih andal dan akurat dari penelitian ini dan penelitin sebelumnya.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas dan kopetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan dapat membantu peningkatan efektivitas dan efesiensi pengelolaan PAD.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat terus meningkat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma dan Susanto, 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, *Ganec Swara Edisi Khusus*, Vol. 4, No. 3, Desember 2010, <https://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma.pdf>
- Budi, S. (2020). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah: Pendekatan Rasio*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmawan, A. (2021). *Kinerja Keuangan Daerah: Analisis dan Strategi Peningkatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Darmawan, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Djpk, 2019, *Data APBD Murni/Perubahan, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 11 Desember 2024*, Djpk kemenkeu, <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Dyah Palupi, Dassaad, Riyanti, BudiWahyudi, 2022, *Analisis kinerja keuangan anggaran dan pendaptan daerah pada pemerintah provinsi kepulauan riau sebelum umpan demi dan saat pandemic covid-19 tahun 2019-2021*, journal
- Halim, A., & Abdullah, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Imam ghozali, 2021, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10"*, Universitas Diponegoro

Jumiati, SE, 2020-2021, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau 2020–2021*, ©Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

-----, 2022-2023, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau 2022–2023*, ©Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Kurniawan, A. (2020). **Manajemen Keuangan Daerah**. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahmudi, 2016, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN

Mahmudi, A., 2019, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN

Mardiasmo. (2018). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Publisher

Rante, J, 2021, *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Efektivitas dan Efisiensi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol. 15, No. 2.

Riyanto, S. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Sari, R., & Sari, D. (2019). **Manajemen Publik**. Yogyakarta: UGM Press.

- Sari, R. A., & Widodo, S. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. New York: Wiley
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Sukirno, S. (2015). *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwanda, D., 2019, *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Vol. 11, No. 1.
- Syaifullah sofyan, 2022, *Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah daerah provinsi banten tahun 2015-2019*. Fakultas ekonomi & bisnis : universitas islam negeri hidayatullah Jakarta